



Ancaman Geopolitik Global Terhadap Keamanan Maritim Indonesia Diantara Dinamika Kawasan Indo-Pasifik

Pangiutan¹⁾, Pujo Widodo²⁾, Abdul Rivai Ras³⁾, Panji Suwarno⁴⁾, Herlina Juni Risma
Saragih⁵⁾

Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

pangiutanlbs@gmail.com¹⁾

pujowidodo78@gmail.com²⁾

Rivai_ras@yahoo.com³⁾

Suwarnopani30@gmail.com⁴⁾

herlina.saragih@idu.ac.id⁵⁾

Abstrak

Posisi Indonesia yang strategis di Kawasan indo-pasifik menjadikannya sebagai negara yang rentan kan ancaman geopolitik global. Indonesia harus mengambil tindakan tegas untuk mengurangi risiko dan memperkuat kemampuan keamanan maritimnya dalam menghadapi berbagai ancaman geopolitik internasional terhadap keamanan maritimnya Namun terdapat berbagai risiko geopolitik yang rumit dan beragam di seluruh dunia yang mempengaruhi keamanan laut Indonesia. Salah satu elemen kunci yang berdampak pada keamanan maritim Indonesia adalah persaingan di kawasan Indo-Pasifik antara negara adidaya termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Tiongkok telah meningkatkan operasi militer dan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan sebagai bagian dari upayanya untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ancaman yang akan dihadapi Indonesia dengan adanya dua kekuatan besar di Kawasan indo-pasifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deduktif dengan menggunakan data sekunder, baik dari buku, jurnal, internet, catatan, arsip, dan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah hingga saat ini posisi kekuatan militer Indonesia berada di urutan bawah dari negara-negara lainnya yang terkait di Indo-Pasifik. Saran Indonesia perlu meningkatkan alutsista pertahanan keamanan untuk bisa menjaga keamanan maritim Indonesia. Serta menjalin kerjasama dan membentuk sebuah aliansi agar bisa saling menjaga satu sama lain.

Kata kunci: Geopolitik, Keamanan Maritim, Indo-Pasifik, Ancaman, Kekuatan

Abstract

Indonesia's strategic position in the Indo-Pacific region makes it vulnerable to global geopolitical threats. Indonesia must take decisive action to mitigate risks and strengthen its maritime security capabilities in the face of various international geopolitical threats to its maritime security, but there are complex and diverse geopolitical risks around the world that affect Indonesia's maritime security. One key element impacting Indonesia's maritime security is the competition in the Indo-Pacific region between superpowers including the United States, China and Russia. China has increased its military operations and territorial claims in the South China Sea as part of its efforts to gain greater influence in the region. The purpose of this research is to examine the threats that Indonesia will face in the presence of two major powers in the indo-pacific region. The method used in this research is deductive qualitative using secondary data, both from books, journals, the internet, records, archives, and others. The result of this research is that until now the position of Indonesia's military power is at the bottom of the other countries involved in the Indo-Pacific. Suggestions Indonesia needs to improve defence and security equipment to be able to maintain Indonesia's maritime security. As well as establishing cooperation and forming an alliance in order to protect each other.

Keywords: Geopolitics, Maritime Security, Indo-Pacific, Threats, Power

PENDAHULUAN

Menurut Brzezinski (1997), ahli strategi dan geopolitik terkenal, geopolitik adalah tentang mengelola kekuasaan dan pengaruh di tingkat global melalui pemahaman mendalam tentang dinamika strategis dan geografis yang memengaruhi kebijakan luar negeri. Brzezinski membahas konsep geopolitik dalam bukunya yang berjudul "Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives" (1997) dalam konteks dominasi global Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dingin. Kaplan (2012), menyatakan bahwa meskipun geografi tidak serta merta menentukan masa depan, geografi menentukan apa yang dapat dicapai dan apa yang tidak dapat dicapai." Perhitungan geopolitik Beijing saat ini dan, khususnya, aspirasi maritimnya dibentuk oleh tulisan Mahan tentang kekuatan laut dan geopolitik yang mendorong Amerika Serikat untuk membangun angkatan laut dan mencari bagian dalam perdagangan Asia pada akhir 1800-an. Tiongkok sedang membangun kekuatan militer dan angkatan laut untuk menjaga jarak dengan angkatan laut AS karena khawatir tentang kemungkinan Taiwan menjadi negara Merdeka (Holmes & Toshi, 2005).

Dengan hampir 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 54.720 kilometer, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia (Sabir & Eliyanti, 2023). Oleh karena itu, Tiongkok mempunyai kepentingan strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik (Armawi & Erlan, 2022). Namun terdapat berbagai risiko geopolitik yang rumit dan beragam di seluruh dunia yang mempengaruhi keamanan laut Indonesia. Salah satu elemen kunci yang berdampak pada keamanan maritim Indonesia adalah persaingan di kawasan Indo-Pasifik antara negara adidaya termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Tiongkok telah meningkatkan operasi militer dan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan sebagai bagian dari upayanya untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut.

Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik

13 negara terdaftar dalam inisiatif kemitraan dagang yang diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 23 Mei 2022



Sumber: White House

AFP

Gambar 1: Peta Kawasan Indo-Pasifik
Sumber: Kompas, 2023

Permasalahan ini menyangkut hak untuk mengeksplorasi sumber daya alam di perairan lepas pantai Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan di kawasan, yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran penting Indonesia dan menimbulkan ancaman (Kemhan RI, 2015).

Karena konsep Indo-Pasifik didasarkan pada konstruksi politik ruang, maka Kosareva & Korolev (2023), menggunakan geopolitik kritis sebagai pendekatan hubungan internasional poststrukturalis dalam penelitian ini. Dengan menggunakan gagasan ini, penulis dapat memproyeksikan persepsi mereka sebagai pemain utama dalam menciptakan kawasan kesejahteraan yang aman dan inklusif di seluruh wilayah. Pada awalnya, ditekankan betapa



pentingnya Eurasia sebagai tempat di mana perselisihan hegemonik antara Kekuatan Besar terjadi. Kemudian dianalisis sebagai tempat kerja sama pembangunan, tempat BRI Tiongkok dan EAEU Rusia bertemu. Terakhir, dibahas strategi AS terhadap Tiongkok, terutama strategi Indo-Pasifik hal ini akan meningkatkan kerja sama antara dua negara besar, Tiongkok dan Rusia, saat ini (Pires & Nascimento, 2021).

Keamanan laut Indonesia juga terkena dampak signifikan dari konflik teritorial di Laut Cina Selatan, yang melibatkan klaim teritorial antara Tiongkok dan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei (Sunoto dkk, 2023). Meski tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, Indonesia mengkhawatirkan stabilitas kawasan dan kebebasan navigasi di jalur perairan penting tersebut. Pembangunan pulau-pulau buatan dan instalasi militer di wilayah sengketa, seiring dengan meningkatnya kehadiran militer pihak-pihak yang terlibat, menimbulkan ancaman terhadap keamanan maritim regional. Karena kenaikan permukaan air laut, bencana alam yang lebih sering dan dahsyat seperti badai tropis, dan pola cuaca yang tidak menentu, perubahan iklim telah membuat keamanan laut menjadi lebih rentan. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena banyaknya pulau-pulau kecil dan penduduk pesisir yang rentan. Keamanan laut mungkin terancam oleh gangguan terhadap infrastruktur pesisir dan jalur pelayaran, yang juga akan mengganggu perdagangan dan perekonomian kelautan secara keseluruhan (Hermawan & Rudi, 2022).

Bahaya lain yang mungkin terjadi terhadap keamanan maritim Indonesia adalah proliferasi persenjataan dan peralatan kelautan berteknologi tinggi. Di kawasan Indo-Pasifik, kehadiran kapal perang, kapal selam, dan sistem rudal anti-kapal menambah kompleksitas dan kemungkinan eskalasi konflik, yang dapat berdampak pada keamanan maritim secara umum. Keamanan laut Indonesia juga sangat terancam oleh kemungkinan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan terorisme maritim (Ali dkk, 2022). Salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudera Hindia. Namun, negara ini rentan terhadap aktivitas kriminal transnasional yang dapat membahayakan stabilitas regional dan perdagangan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada jalur perdagangan maritim baik untuk impor maupun ekspor. Ancaman terhadap keamanan maritim, termasuk pembajakan atau aksi teroris, berpotensi menyabotase stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi dengan mengganggu aliran produk dan energi (Hermawan & Rudi, 2022).

Indonesia harus mengambil tindakan tegas untuk mengurangi risiko dan memperkuat kemampuan keamanan maritimnya dalam menghadapi berbagai ancaman geopolitik internasional terhadap keamanan maritimnya. Untuk mendukung perdamaian regional dan kebebasan navigasi di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia perlu meningkatkan diplomasi multilateral dengan negara tetangga dan negara lain (Shafitri Dkk, 2024). Untuk memperkuat kapasitas pemantauan dan penegakan hukum di laut nasional, berinvestasi dalam pertumbuhan dan modernisasi Angkatan Laut dan organisasi keamanan maritim lainnya. Membuat rencana mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap keamanan maritim, khususnya infrastruktur pesisir yang berketahanan. Mendorong kolaborasi antara kelompok non-pemerintah dan sektor komersial dalam mengamati dan mempertahankan diri dari ancaman terhadap keamanan laut internasional (Armawi & Erlan, 2022).

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deduktif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif deduktif melibatkan pendekatan dimana peneliti memulai dengan teori yang sudah ada dan kemudian mengumpulkan data untuk menguji teori tersebut. Teori yang ada menjadi titik tolak penelitian kualitatif deduktif. Sugiyono mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pendekatan deduktif melibatkan menguji teori atau hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. Teori ini berfungsi sebagai landasan bagi pertanyaan penelitian spesifik dan hipotesis yang dirumuskan peneliti. Peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan teori yang dipilih, yang akan diuji dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Sugiyono (2016),



menjelaskan bahwa terdapat empat teknik pengumpulan data sekunder yaitu studi pustakan, analisis dokumen, analisis arsip, dan analisis konten. Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan ancaman geopolitik global terhadap keamanan maritim Indonesia diantara dinamika kawasan Indo-Pasifik. Analisis dokumen pada dasarnya mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia seperti jurnal, buku, majalah, koran, website internet, berita online, arsip, catatan resmi, dan dokumen lainnya (Nilamsari, 2014). Selanjutnya, analisis arsip yaitu menganalisis data dari arsip atau basis data yang tersedia, seperti data statistik, survei, atau basis data lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan yang terakhir ialah analisis konten, menganalisis isi teks dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau informasi yang relevan dengan penelitian (Rozali, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Indo-Pasifik

Dalam konteks geopolitik dan ekonomi, istilah "Indo-Pasifik" sering digunakan untuk merujuk pada wilayah yang meliputi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, bersama dengan negara-negara di sekitarnya. Beberapa negara besar di wilayah ini termasuk India, Jepang, Australia, dan negara-negara ASEAN, serta wilayah pesisir di Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Oseania. Konsep ini menekankan betapa pentingnya wilayah ini dalam dinamika global saat ini, seperti dalam hal keamanan maritim, perdagangan, dan kerja sama regional (Upadhyaya, 2022). Perbedaan strategis antara kekuatan aktif di kawasan Indo-Pasifik, terutama antara Tiongkok dan Amerika Serikat, telah memicu konfrontasi baru antara kedua negara tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan politik dan ekonomi mereka di kawasan Indo-Pasifik, dan bahwa aliansi "AUKUS" akan menjadi alat yang efektif untuk mencegah ancaman dari Tiongkok (Diabat, 2023). Untuk menciptakan stabilitas regional dengan meningkatkan kemampuan pencegahan sekutu regional Amerika Serikat, terutama karena aliansi tersebut memiliki banyak faktor yang serupa dalam hal kelangsungan hidup dan kesinambungan. Pada tanggal 15 September 2021, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan kemitraan keamanan tripartite yang disebut AUKUS karena perkembangan pesat di kawasan Indo-Pasifik (Diabat, 2023).

Setelah perang melawan Ukraina, ekspansi Rusia ke Asia menjadi lebih signifikan. Hal ini harus dilihat karena kepentingan Rusia dalam menghadapi kekuatan AS di tengah krisis tatanan internasional liberal. Para ahli strategi AS baru-baru ini tidak banyak mempertimbangkan kebijakan luar negeri Rusia. Karena perang di Ukraina mendekatkan Rusia dan Tiongkok, para pengambil kebijakan AS harus lebih memperhatikan Rusia di masa depan. Rusia semakin bergantung pada Tiongkok untuk menghindari sanksi dan melawan isolasinya dari Barat. Akibatnya, kedua negara ini mungkin akan bekerja sama lagi di masa depan. Keterlibatan Tiongkok pada Rusia sebagai mitra tambahan di wilayah ini membantu melawan pengaruh AS (Batta, 2023).

Keamanan Maritim

Istilah "keamanan maritim" mengacu pada masalah baru dan mendorong orang untuk membantu menghadapinya. Kata kunci memungkinkan orang di seluruh dunia bekerja sama. Namun, hal ini juga berisiko menyembunyikan perbedaan pendapat dan perselisihan politik. Dibutuhkan suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat karena tidak ada prospek untuk mendefinisikan keamanan maritim untuk selamanya (Bueger, 2015). Bueger merekomendasikan tiga kerangka kerja untuk keamanan maritim. Konsep lain seperti keselamatan maritim, kekuatan laut, ekonomi biru, dan ketahanan adalah cara terbaik untuk memahami keamanan maritim. Kedua, kerangka sekuritisasi memungkinkan kita mempelajari bagaimana ancaman maritim terjadi dan klaim politik apa yang diperlukan untuk mengungkap berbagai ideologi dan kepentingan politik. Ketiga, teori praktik keamanan memungkinkan studi tentang apa yang sebenarnya dilakukan para aktor ketika mereka mengklaim dapat meningkatkan keamanan maritim. Secara keseluruhan, pemetaan keamanan



maritim dimungkinkan oleh struktur ini (Buerger, 2015).

Pakar maritim terkenal Geoffrey Till mendefinisikan keamanan maritim sebagai perlindungan terhadap ancaman maritim yang mencakup berbagai elemen seperti militer, ekonomi, lingkungan hidup, dan kriminal. Ia menekankan pentingnya kerja sama internasional dan peran angkatan laut dalam menjaga stabilitas maritim global (Till, 2014). Natalie Klein adalah pakar hukum internasional yang berkonsentrasi pada hukum laut dan keamanan maritim. Natalie Klein menggarisbawahi bahwa keamanan maritim harus dilihat dari perspektif hukum internasional yang luas karena hukum internasional sangat penting untuk mengatur aktivitas maritim dan melindungi kepentingan negara di laut. Ia menyatakan bahwa hukum laut, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), memberikan fondasi penting untuk menjaga keamanan maritim dan mengatur pemanfaatan laut. Perlindungan dari ancaman tradisional, seperti konflik antarnegara, serta ancaman non-tradisional, seperti pembajakan, penyelundupan, dan terorisme, adalah bagian dari keamanan maritim (Klein, 2011).

Kekuatan Besar di Indo-Pasifik dan Pengaruhnya

Dalam artikel yang ditulis Liu (2020), menyatakan baik Tiongkok maupun Amerika Serikat berusaha mengubah peta geopolitik Asia untuk keuntungan ekonomi dan keamanan masing-masing. Liu (2020), menunjukkan bagaimana kedua Kekuatan Besar ini mengubah strategi dan meningkatkan ketegangan karena perbedaan pandangan tentang masa depan. Dalam upayanya untuk menjadi Kekuatan Besar, Tiongkok telah menerapkan kebijakan keamanan yang ketat terhadap negara-negara tetangganya dan secara aktif mendukung inisiatif regional seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Namun, strategi regional Amerika berubah dari "penyeimbangan kembali ke Asia" menjadi fokus pada wilayah "Indo-Pasifik" untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memilih untuk melunakkan orientasi kebijakan luar negerinya yang proaktif di tengah meningkatnya perang dagang dan masalah lain yang dihadapi di wilayah tersebut. Secara khusus, Tiongkok telah berusaha mengurangi retorika internalnya, memperkuat hubungan strategis dengan India dan Jepang, dan mendapatkan dukungan dari anggota ASEAN di Laut Cina Selatan. Dalam kaitannya dengan strategi Indo-Pasifik, akan lebih menguntungkan bagi Tiongkok untuk menyampaikan visi regional yang lebih inklusif dan mendorong kerangka kelembagaan yang memungkinkan AS untuk berpartisipasi (Liu, 2020).

Tabel 1: Kekuatan negara-negara di Indo-Pasifik

| Negara | Anggaran Militer (Miliar USD) | Personel Militer Aktif | Kapal Perang Utama | Pesawat Tempur Utama |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Amerika Serikat | 750 (2022) | 1.400.000 | 11 (carrier fleet) | 1,200 + |
| China | 250 (2022) | 2.035.000 | 2 (carrier fleet) | 1,500 + |
| India | 70 (2022) | 1.400.000 | 1 (aircraft carrier) | 600 + |
| Jepang | 50 (2022) | 247.000 | 4 (carrier fleet) | 350 + |
| Rusia | 65 (2022) | 900.000 | 1 (aircraft carrier) | 750 + |
| Australia | 28 (2022) | 58.000 | - | 100 + |
| Korea Selatan | 44 (2022) | 625.000 | - | 500 + |
| Indonesia | 8 (2022) | 400.000 | - | 150 + |
| Singapura | 11 (2022) | 71.000 | - | 50 + |

Sumber: *Global FirePower (GFP) 2024, diolah oleh penulis*



Melalui pangkalan militer dan armada angkatan laut, Amerika Serikat memiliki kehadiran militer yang signifikan di Indo-Pasifik. Tujuan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat adalah untuk menjaga kebebasan navigasi, memperkuat aliansi, dan mengurangi dominasi Tiongkok. Kebijakan "Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka" (FOIP) menempatkan titik konsentrasi pada kerja sama ekonomi, diplomasi, dan keamanan (U.S. Department of Defense, 2019). Tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan klaim teritorialnya sering menimbulkan ketegangan dengan negara lain di wilayah tersebut. Tiongkok terus memperkuat pengaruhnya melalui proyek infrastruktur seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan meningkatkan kemampuan angkatan lautnya (Zhang, 2018). Australia berfokus pada kerja sama regional untuk mengatasi masalah keamanan maritim, seperti penyelundupan dan terorisme maritim. Selain itu, Australia berpartisipasi dalam QUAD dan melakukan latihan militer gabungan. Selain itu, kebijakan pertahanan Australia mencakup meningkatkan kemampuan angkatan laut dan bekerja sama dengan mitra di Indo-Pasifik (Medcalf, 2020).

Aliansi dan Kerjasama di Indo-Pasifik

Setidaknya terdapat tujuh aliansi yang ada di Indo-Pasifik, Quad (*Quadrilateral Security Dialogue*) yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Quad memiliki tujuan menjaga stabilitas regional, memfasilitasi navigasi bebas, dan meningkatkan kerja sama dalam keamanan maritim. Latihan militer, komunikasi informasi, dan kolaborasi dalam bidang keamanan non-tradisional seperti bencana alam dan keamanan siber (Smith, 2019). Selanjutnya ada ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang beranggotakan 10 negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Memiliki tujuan meningkatkan kerja sama antar negara anggota dalam hal politik, ekonomi, dan keamanan dan mendorong stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. *Forum Regional ASEAN* (ARF) didirikan untuk berbicara tentang keamanan dan bekerja sama tentang masalah seperti terorisme, keamanan maritim, dan manajemen bencana (Emmers, 2017).

The Australia-United Kingdom-United States (AUKUS) didirikan karena Australia perlu mengganti armada kapal selamnya yang sudah tua. Dengan bantuan Amerika Serikat dan Inggris, mereka akan membangun kapal selam bertenaga nuklir. Selain itu, Inggris akan memperoleh tambahan kapal selam dan memperluas peran strategisnya di kawasan Indo-Asia-Pasifik. Selain rencana kapal selam, AUKUS berfokus pada pengembangan teknologi pertahanan canggih. Dengan tanggapan negara-negara Persemakmuran yang menunjukkan perspektif strategis dan kebutuhan pertahanan mereka, AUKUS memiliki dampak yang signifikan bagi negara-negara Persemakmuran di Asia dan Pasifik (McDougall, 2023). Saat *Five Powers Defense Arrangement* (FPDA) ditandatangani oleh lima negara pada bulan November 1971, pertahanan kolektif hanyalah diskusi (Chua, 2016). Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia membentuk aliansi pertahanan *Five Powers Defense Arrangement* (FPDA) untuk membantu Malaysia dan Singapura, negara Persemakmuran Inggris, karena mereka menganggap Indonesia sebagai ancaman (Emmers, 2012). *Indian Ocean Rim Association* (IORA) beranggotakan 23 negara pesisir Samudra Hindia, termasuk India, Indonesia, Australia, dan Afrika Selatan. IORA Meningkatkan kerjasama ekonomi dan keamanan di kawasan Samudra Hindia. Memiliki tujuan utama dalam kerjasama dalam keamanan maritim, perdagangan dan investasi, perikanan, dan pariwisata (IORA, 2021). *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) and ADMM-Plus* yang beranggotakan 10 negara ASEAN, plus 8 mitra dialog (Australia, China, India, Jepang, New Zealand, Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat) dengan tujuan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan di antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialog, serta Latihan militer bersama, pertukaran informasi, dan kerjasama dalam isu-isu keamanan seperti terorisme, bencana alam, dan keamanan maritim (ASEAN Secretariat, 2020). *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan tujuan Meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi antara China dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik melalui pembangunan infrastruktur, serta Investasi dalam proyek-proyek pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan energi di negara-negara mitra (Yu, 2017).



Dispute Territorial (Sengketa Wilayah)

Berdasarkan peta yang menunjukkan "Sembilan Garis Putus", Tiongkok mengklaim sekitar 90% wilayah Laut Cina Selatan. Klaim ini mencakup hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang juga diklaim oleh negara lain (Hu, 2023). Sedangkan, negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan garis pantai dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diakui UNCLOS. Klaim-klaim ini lebih terbatas dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang diakui secara global (Peng, 2022). Sebagian besar klaim Tiongkok didasarkan pada narasi dan peta sejarah. Negara itu percaya bahwa mereka memiliki kedaulatan historis atas wilayah-wilayah ini karena mereka telah menggunakannya dan mengendalikannya selama bertahun-tahun. Klaim negara-negara Asia Tenggara didasarkan pada UNCLOS, atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang memberi mereka hak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut dari garis pantainya. Klaim ini menekankan prinsip-prinsip hukum internasional dan aturan yang diakui secara internasional (UNCLOS, 1982). Dengan adanya perbedaan landasan hukum yang digunakan sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai perbatasan laut hal ini terjadi dikarenakan negara China tidak patuh terhadap UNCLOS 1982 yang bahkan negara China juga ikut meratifikasi tidak mau menjalankannya. Bahkan negara China malah membuat klaim sendiri atas Sembilan garis putus-putus (*nine dash-line*) tanpa adanya landasan hukum internasional yang pernah ada (Li, 2022).

Karena berbagai alasan, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menilai sengketa *South China Sea* (SCS) antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara (Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei) sangat memprihatinkan (Hu, 2023). Pertama, perselisihan ini telah menjadi pusat konflik di Asia Tenggara (Severino, 2014), yang memengaruhi negara-negara ASEAN dan merusak perdamaian di wilayah tersebut. Kedua, perselisihan ini menjadi penghalang untuk memperkuat hubungan ASEAN-Tiongkok. Misalnya, pernyataan ASEAN yang ditarik kembali pada tahun 2016 menyatakan bahwa negara-negara ASEAN "berharap dapat bekerja sama dengan Tiongkok untuk membawa kerja sama Tiongkok-ASEAN ke tingkat berikutnya", tetapi mereka tidak dapat mengabaikan "apa yang terjadi di Laut Cina Selatan" (Thayer, 2016). Pertama, dalam menangani perselisihan, negara-negara anggota ASEAN memiliki kebijakan dan kepentingan yang sama. Kedua, sering menyatakan bahwa pengaruh Tiongkok terhadap setiap negara anggota ASEAN tidak sekuat yang dibayangkan. Ketiga, ASEAN mencapai tujuan penting tetapi mengabaikan tujuan yang tidak penting. Akibatnya, tingkat pencapaian tujuan ASEAN dianggap moderat. Keempat, metode ASEAN menangani konflik lebih baik daripada metode legalistik dan antipatis (Hu, 2023).

Ancaman Non-Tradisional di Indo-Pasifik

Ancaman non-tradisional di Indo-Pasifik terdiri dari berbagai tantangan yang tidak terkait dengan konflik militer langsung, tetapi tetap mengancam stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa ancaman non-tradisional utama di wilayah tersebut antara lain: *pollution, smuggling, IUU fishing, piracy, human trafficking, resilience, inter-state dispute, arms proliferation, terrorist acts, climate change, and accidents* (Buerger, 2015). Keamanan maritim mencakup masalah seperti pembajakan, perompakan, dan perdagangan manusia dan narkoba. Di dua wilayah Indo-Pasifik, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, aktivitas ilegal sering terjadi, mengancam perdagangan internasional dan stabilitas regional (Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, 2021). Terorisme dan ekstremisme merupakan ancaman besar bagi beberapa negara Indo-Pasifik. Kelompok teroris seperti Abu Sayyaf di Filipina dan jaringan teroris regional lainnya dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kekerasan di wilayah tersebut (O'Brien, 2012). Penangkapan ikan ilegal adalah masalah besar yang mengancam ekosistem laut dan ekonomi negara pesisir. Kegiatan IUU biasanya melibatkan kapal asing yang melanggar batas wilayah perairan negara lain, menyebabkan penangkapan ikan berlebihan dan kerusakan habitat laut (Kuemlangan et.al. 2023).

Penggunaan senjata api, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia, pencurian, penipuan, kerusakan kapal dan fasilitas pelabuhan, penangkapan ikan



ilegal, dan polusi adalah semua masalah yang dapat mengganggu rantai pasokan maritim ke negara-negara kelas atas di seluruh dunia. Karakteristik dan efek ancaman keamanan terhadap industri pelayaran dan pelabuhan internasional yang berdampak pada perdagangan internasional dan ekonomi pemerintah dengan mempertimbangkan perubahan geopolitik, jalur komunikasi maritim, titik hambatan pada jalur perdagangan maritim, dan otonomi kapal (Bhuiyan, 2019). Selain melihat perkembangan otomatisasi dan digitalisasi operasi pelayaran dan pelabuhan, evaluasi dilakukan terhadap undang-undang keamanan maritim saat ini. Makalah ini mengidentifikasi kemajuan lebih lanjut dalam undang-undang keamanan maritim yang ada terkait dengan pembajakan dan intelijen di laut dan merekomendasikan amandemen terhadap *International Ship and Port Security (ISPS)* yang ditetapkan oleh Konvensi SOLAS dengan mempelajari wawasan transportasi maritim modern, undang-undang yang ada, dan skenario ancaman terhadap operasi pelayaran dan Pelabuhan (Klein, 2017).

Strategi Nasional di Kawasan Indo-Pasifik

Untuk menghadapi ancaman keamanan maritim di Indo-Pasifik, rencana nasional Indonesia mengambil pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Dengan membeli kapal perang, kapal patroli, dan peralatan canggih lainnya, Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas Angkatan Laut. IISS (2014) melaporkan bahwa dari 300.400 anggota TNI AL, TNI AL hanya memiliki 65.000. Kondisi ini wajar karena Indonesia lebih suka mempertahankan profil damai daripada asertif. Namun, kekuatan militer Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), terutama dalam hal keamanan maritim, mengingat luasnya wilayahnya. Selain itu, tingginya pajak, kurangnya fasilitas dan peralatan, dan tingginya biaya produksi akibat pajak menyebabkan industri strategis dalam negeri Indonesia, terutama sektor perkapalan, lambat berkembang. Di antara langkah-langkah tersebut adalah membangun kapal perang sendiri dan membeli kapal selam baru. meningkatkan pelatihan dan latihan militer, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk meningkatkan kesiapan operasional dan kemampuan untuk menanggapi ancaman maritim (Gindarsah, 2014).

Poros maritim yang diusung Jokowi mengakui posisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan dan menekankan peran maritim sebagai alat untuk kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Platform kebijakan luar negeri Jokowi menekankan bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan maritim regional yang kuat dalam diplomasi dan menyelesaikan konflik wilayah maritim dengan negara tetangga, menjaga domain maritim Indonesia, dan mengurangi ketegangan maritim antar negara-negara besar di kawasan. Ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi upaya Indonesia untuk menerapkan politik luar negerinya (Agastia et al. 2015). Jokowi mengemukakan lima poin kebijakan regional Indonesia: pertama, memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN; kedua, memperkuat struktur regional untuk mencegah hegemoni kekuatan besar; tiga, membangun hubungan bilateral yang strategis; empat, mengawasi dampak ekonomi integrasi dan perdagangan bebas pada perekonomian domestik; dan lima, "kerja sama maritim komprehensif." (Neary, 2016).

Peran Militer dan Keamanan

Peran militer dalam menjaga keamanan maritim Indonesia sangat penting, terutama mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus memperbarui armada kapal perangnya dengan membeli fregat, korvet, dan kapal selam baru. Salah satu contohnya adalah kapal selam KRI Nagapasa-403 kelas Chang Bogo yang dibuat oleh Korea Selatan. Mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam sistem persenjataan dan radar untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menanggapi ancaman maritim. Teknologi ini termasuk sistem komunikasi, sonar, dan radar canggih (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Membangun dan memperbaiki pangkalan angkatan laut di daerah strategis seperti Natuna dan Papua untuk membantu operasi militer dan melakukan pengawasan maritim. upaya untuk meningkatkan kapasitas pemeliharaan dan perbaikan kapal perang di galangan kapal nasional untuk memastikan kesiapan kapal perang untuk operasional. membuat doktrin



pertahanan yang lebih responsif untuk menghadapi ancaman maritim kontemporer, termasuk ancaman asimetris seperti pembajakan dan terorisme. membentuk satuan khusus di bawah TNI Angkatan Laut yang berfokus pada penegakan hukum dan keamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut dan Satuan Kapal Cepat (Manurung, 2020).

Jokowi mendefinisikan "poros maritim" sebagai kekuatan maritim regional di Indo-Pasifik. Buku Putih Pertahanan sebelumnya, yang diterbitkan pada tahun 2008, banyak menekankan isu-isu keamanan dalam negeri seperti separatisme dan kekerasan dalam negeri terkait etnis, agama, ras, dan komunitas, serta pemeliharaan pertahanan kontinental. Namun, buku tersebut kurang memperhatikan masalah keamanan dalam negeri seperti titik hambatan laut, ZEE, dan pulau-pulau terluar Indonesia. Selain itu, peningkatan anggaran untuk pertahanan diharapkan dapat membiayai tindakan pertahanan di perairan Indonesia, seperti membangun pangkalan militer dengan pesawat tempur di Natuna untuk melindungi pulau dari kemungkinan konflik di Laut Cina Selatan. Namun yang terpenting, anggaran pertahanan akan disesuaikan untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut untuk mencapai MEF yang diperlukan untuk melindungi perairan Indonesia (Agastia et al. 2015).

Kesimpulan

Kawasan Indo-Pasifik memiliki signifikansi geopolitik dan ekonomi yang sangat penting, mencakup Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta negara-negara di sekitarnya seperti India, Jepang, Australia, dan ASEAN. Ketegangan di kawasan ini terutama dipicu oleh persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, yang berusaha melindungi kepentingan politik dan ekonominya. AUKUS, aliansi antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, adalah salah satu upaya untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok di wilayah ini. Pasca perang Ukraina, Rusia juga semakin terlibat dalam dinamika Indo-Pasifik, berkolaborasi dengan Tiongkok untuk menghadapi tekanan dari Barat.

Keamanan maritim merupakan isu krusial di Indo-Pasifik, mencakup perlindungan terhadap ancaman militer, ekonomi, lingkungan, dan kriminal. Kerjasama internasional, seperti yang disarankan oleh Geoffrey Till dan Natalie Klein, sangat penting untuk menjaga stabilitas maritim global. Beberapa aliansi dan kerjasama yang beroperasi di kawasan ini, seperti Quad, ASEAN, AUKUS, dan FPDA, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional.

Sengketa wilayah, terutama di Laut Cina Selatan, menjadi sumber ketegangan signifikan. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut berdasarkan peta sejarah, sedangkan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei mengklaim berdasarkan prinsip UNCLOS yang diakui secara internasional. Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS menjadi salah satu penyebab utama perselisihan ini, yang dinilai ASEAN sangat memprihatinkan karena berdampak pada stabilitas regional.

Secara keseluruhan, keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup kerjasama internasional, penghormatan terhadap hukum internasional, dan dialog yang konstruktif antara negara-negara di kawasan ini. Untuk itu Indonesia harus mengambil peran penting dalam Kawasan Indo-Pasifik, mengingat wilayah Indonesia berada di posisi yang strategis. Berdasarkan Poros Maritim (PMD) yang digagas oleh presiden Joko Widodo ini, bisa menandakan kebangkitan Indonesia di bidang maritim dan menjadi titik acuan negara-negara lain yang merupakan negara kepulauan juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge.
- Agastia, I. G. B. D., & Perwita, A. A. B. (2015). Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific. *Journal of ASEAN Studies*, 3(1), 32-41. <https://doi.org/10.21512/jas.v3i1.751>



- AIM (2014) <https://www.africaportal.org/features/maritime-security-implementing-aus-aim-strategy/> Refers to AU Maritime Strategy AIM 2050.
- Ali, I. Mutaqin. Dkk. (2022). "Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Education and Development*. Vol.10 No.2
- Anwar, Laraswati A. (2023, Maret 9). AS Berkomitmen Ikuti Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. *Kompas*. https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/03/08/as-berkomitmen-ikuti-pandangan-asean-terhadap-indo-pasifik?open_from=Search_Result_Page
- Armawi, Armaidly & Erlan, Wijatmoko. (2022). "Asia Pasifik Memanas, Ancamankah Bagi ASEAN dan Indonesia?" *Journal of International Studies*. Volume 7, No. 1, (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17
- ASEAN Secretariat. (2020). "ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) and ADMM-Plus."
- Australian Government Department of Defence. (2020). *2020 Defence Strategic Update*.
- Barnes J.Makinda S. M. 2022. "Testing the limits of international society? Trust, AUKUS and Indo-Pacific security" *International Affairs*: DOI: 10.1093/ia/iia111
- Bateman, S. (2016). *South China Sea: Current Issues and Disputes*. Routledge.
- Batta, Anna. 2023. "Russia in the Indo-Pacific Region." *Asian Perspective*, vol. 47 no. 2, 2023, p. 189-207. Project MUSE, <https://doi.org/10.1353/apr.2023.0008>.
- Bellamy (2011), Chris, 'Maritime Piracy: Return of the World's Second-oldest Security Problem', *RUSI Journal*, 22 December 2011, pp. 78-83. Published online: 22 Dec 2011.
- Brewster, D. (2019). "The India-Australia Security and Defence Relationship: Developments, Challenges and Prospects." *Australian Journal of International Affairs*, 73(5), 397-412.
- Brewster, D. (2014). *India's Ocean: The Story of India's Bid for Regional Leadership*. Routledge.
- Brzezinski, Zbigniew. 1997. "The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives." Basic Books.
- Bueger, Christian. 2015. "What is Maritime Security?" Forthcoming in *Marine Policy*: Cardiff University.
- Buzan (1998), Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security. A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Buszynski, L., & Roberts, C. B. (2014). *The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and Regional Perspectives*. Routledge
- Chalk, P. (2008) *The Maritime Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- China (2015) *China's Island Building in South China Sea*, <https://southfront.org/chinas-artificial-islands-southchina-sea-review/>.
- Chua, D. W. B. (2016). America's Role in the Five Power Defence Arrangements: Anglo-American Power Transition in South-East Asia, 1967–1971. *The International History Review*, 39(4), 615–637. <https://doi.org/10.1080/07075332.2016.1241952>
- Clinton, H. (2011). *America's Pacific century*. Foreign policy, (189), 56.
- Collins (2018), Alan, Ed., *Contemporary Security Studies*, 5th Edition, Oxford, Oxford University Press.
- Department of Defense. 2018. *National Defense Strategy The United States of America: Sharpening the American Military's Competitive Edge. (Summary Version)*. Washington DC. Available at: <<https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-DefenseStrategy-Summary.pdf>>
- Diabat, K.S. 2023. "Hybrid Balancing" in the Indo-Pacific Region: "AUKUS" vs. "Belt and Road." *Dirasat: Human and Social Sciences*. DOI: 10.35516/hum.v50i5.935
- Emmers, R. (2017). "Unpacking ASEAN Neutrality: The Quest for Autonomy and Impartiality in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 192-212.
- Emmers, R. (2014). "The ADMM and ADMM-Plus: The Dynamics of Multilateralism in Defence Diplomacy." *Asian Security*, 10(3), 177-191.
- Emmers, R. (2012). *The Five Power Defence Arrangements and Defense Diplomacy in Southeast Asia*. *Asian Security*, 8(3), 271–286. <https://doi.org/10.1080/14799855.2012.723921>



- Escobar, P. 2017. Putin, Xi Jinping e parceiros na Nova Rota da Seda. Porto Alegre: Carta Maior. Available at: <<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Putin-Xi-Jinping-e-parceiros-na-Nova-Rotada-Seda/6/38105>>
- Freire, M. 2013. "Confluência na Ásia? As relações Rússia-China". *Relações Internacionais*, Lisboa, n.38. Available at: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992013000200008>.
- Gabuev, A. 2015. Eurasian Silk Road Union: towards a Russia-China consensus? Tóquio: The Diplomat. Available at: <<http://thedi diplomat.com/2015/06/eurasian-silk-road-union-towards-a-russia-china-consensus/>>
- Green Belt and Road Initiative Center. 2020. Countries of the Belt and Road Initiative (BRI). Beijing. Available at: <<https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri?cookie-state-change=1607656613607>>
- Green, M. J., & Shearer, A. (2012). *Defining U.S. Indian Ocean Strategy*. Center for a New American Security.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). "Buku Putih Pertahanan Indonesia." https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20190927_76bppi--revisi-2-mar--2016--sesuai-kol-sinulingga--arahan-dir.pdf
- Kissinger, H. 2011. *Sobre a China*. Ri
- Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford University Press.
- Klein, N. (2009). "Legal Implications of Australia's Maritime Identification System." *Ocean Development & International Law*, 40(4), 270-291.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Yale University Press.
- Heiduck, F., & Wacker, G. (2020). Vom Asien- Pazifik zum Indo- Pazifik. Retrieved from https://www.swpberlin.org/publications/products/studien/2020S09_indopazifik.pdf
- Hermawan, Tofan & Rudi, Sutanto. (2022). "Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Ancaman Dan Kekuatan Laut." *Jurnal Education and Development*. Vol.10 No.2
- Hu, Le. 2023. "Examining ASEAN's effectiveness in managing South China Sea disputes." *The Pacific Review*, 36:1, 119-147, DOI: 10.1080/09512748.2021.1934519
- Hussain. Z. (2021). AUKUS Alliance: Will it lead the world towards a 'Nuclear Winter! Retrieved from <https://muslimmirror.com/eng/aukus-alliance-will-it-lead-the-world-towards-a-nuclear-winter/>.
- Holmes, James R. & Toshi, Yoshihara. (2005). Pengaruh Mahan terhadap Strategi Maritim Tiongkok. *Strategi Komparatif*, 24 (1), 23–51. <https://doi.org/10.1080/01495930590929663>
- IORA. (2021). "IORA Action Plan 2017-2021."
- Kaplan, Robert D. 2012. *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate*. New York: Random House, 2012. xxii and 403 pp., maps, notes, and index. \$28.00 cloth (ISBN 978-1-4000-6983-5); \$20.42 e-book (ISBN 978-0-679-60483-9). Reviewed by Ron Johnston, School of Geographical Sciences, University of Bristol, Bristol, UK.
- Kosareva, E.S. & Korolev, A.S. 2023. *Salient Features of The Indo-Pacific Region Conceptualization By Indonesia And India*. Southeast Asia: Actual Problems of Development. DOI: [10.31696/2072-8271-2023-4-3-60-020-033](https://doi.org/10.31696/2072-8271-2023-4-3-60-020-033)
- Kuemlangan et.al. 2023. "Enforcement approaches against illegal fishing in national fisheries legislation." *Marine Policy*: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>
- Li, M. 2022. "ASEAN's responses to AUKUS: implications for strategic realignments in the Indo-Pacific" *China International Strategy Review*: DOI: 10.1007/s42533-022-00121-2
- Liu, Feng. 2020. "The recalibration of Chinese assertiveness: China's responses to the Indo-Pacific challenge." *International Affairs*, Volume 96, Issue 1, January 2020, Pages 9–27, <https://doi.org/10.1093/ia/iiz226>
- McDougall, D. 2023. "AUKUS: a Commonwealth perspective." Round Table: DOI: 10.1080/00358533.2023.2286841



- Mearsheimer, J. J. (2010). The gathering storm: China's challenge to US power in Asia. *The Chinese journal of international politics*, 3(4), 381-396.
- Medcalf, R. (2021). "AUKUS: A Watershed in Australia's Defence and Strategic Thinking." *Australian Strategic Policy Institute*.
- Medcalf, R. (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester University Press.
- Miller, M. (2021). The Quad, AUKUS, and India's Dilemmas. Retrieved from <https://www.cfr.org/article/quad-aukus-andindias-dilemmas>.
- Mishra, R. (2015). "The Indian Ocean Rim Association: Maritime Security Challenges and Prospects for Cooperation." *Journal of the Indian Ocean Region*, 11(1), 20-35.
- Nilamsari, Natalina. (2014). "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana*. Volume XIII No.2
- O'Brien, McKenzie. (2012). Fluctuations Between Crime and Terror: The Case of Abu Sayyaf's Kidnapping Activities. *Terrorism and Political Violence*, 24(2), 320-336. <https://doi.org/10.1080/09546553.2011.648679>
- Pant, H. V., & Joshi, Y. (2015). *The US Pivot and Indian Foreign Policy: Asia's Evolving Balance of Power*. Palgrave Macmillan.
- Peng, N., & Ngeow, CB (2022). Mengelola Sengketa Laut Cina Selatan: Pendekatan Multilateral dan Bilateral. *Perkembangan Kelautan & Hukum Internasional*, 53 (1), 37-59. <https://doi.org/10.1080/00908320.2022.2034555>
- Rolland, N. (2017). *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. National Bureau of Asian Research.
- Rozali, Yuli Asmi. (2022). "Penggunaan Analisa Konten dan Analisis Tematik." *Forum Ilmiah*. Volume 19 No.1
- Sabir, Muhammad R. P. & Eliyanti, A. M. (2023). "Analisis Potensi Maritim Indonesia." DOI:[10.31219/osf.io/dnrt3](https://doi.org/10.31219/osf.io/dnrt3)
- Sethi, M. (2021). AUKUS from an Indian Perspective Retrieved from <https://www.apln.network/projects/aukus/aukus-froman-indian-perspective>
- Severino, R. C. (2014). Preventing Conflict in the South China Sea. In P. Chachavalpongpun (Ed.), *Entering uncharted waters? ASEAN and the South China Sea*. (pp.3-15). Singapore: ISEAS Publishing.
- Shafitri, Desy Nur. Dkk. (2024). "Respon ASEAN atas Keterlibatan Amerika Serikat di Laut China Selatan: Tinjauan Teori Balance of Threat." *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol.15, No. 1, doi: 10.14710/politika.15.1.2024. 55-78
- Singh, B. (2011). "The Five Power Defence Arrangements: Ensuring a Future Beyond 40." *RSIS Monograph No. 21*.
- Smith, J. M. (2019). "The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo-Pacific." *American Foreign Policy Council*.
- Smith, S. A. (2018). *Japan's Security Renaissance: New Policies and Politics for the Twenty-First Century*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunoto, S. Puguh. Dkk. (2023). "Dampak Sekuritas Konflik Laut China Selatan Terhadap Keamanan Maritim Indonesia." *Jurnal Ketahanan Stratejik Nasional*. Vol. 6: No. 2, Article 7. DOI: 10.7454/jkskn.v6i2.10084
- Suzuki, H. (2020). Japan's leadership role in a multipolar Indo-Pacific. Center for Strategic International Studies. <https://www.csis.org/analysis/japans-leadership-role-multipolar-indo-pacific>.
- Tan, A. T. H. (2008). "The Five Power Defence Arrangements: The Continuing Relevance." *Australian Journal of International Affairs*, 62(3), 569-594.
- Thayer, C. (2016a, June 19). Revealed: The truth behind ASEAN's retracted Kunming statement. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/06/revealed-the-truthbehind-aseans-retracted-kunming-statement/>



- Till, Geoffrey. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge.
- Upadhyaya, S. 2022. "Harmonizing maritime governance in the Indo-Pacific region." *Journal of the Indian Ocean Region*. DOI: 10.1080/19480881.2022.2118194
- U.S. Department of Defense. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report*.
- White House. (2022). *U.S. Indo-Pacific Strategy*.
- Yu, H. (2017). "Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank." *Journal of Contemporary China*, 26(105), 353-368.
- Zhang, D. (2018). *China's New Maritime Silk Road: Implications and Opportunities for the Indo-Pacific Region*. National Bureau of Asian Research.